



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2766-2776

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Perbedaan Pilihan Politik Pilkada terhadap Hubungan Masyarakat dan Pemerintah Desa Mooat

Dwi Yanti Papatungan, Rauf A. Hatu, Dewinta Rizky Hatu
Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi
dwipapatungan24@gmail.com, raufhatu@ung.ac.id, dewinta@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak perbedaan pilihan politik dalam Pilkada 2024 terhadap hubungan masyarakat dan pemerintah di Desa Mooat, Kecamatan Mooat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Latar belakang penelitian ini didasari oleh munculnya polarisasi sosial yang menyebabkan perpecahan dan ketegangan di tengah masyarakat setelah pemilihan berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan pilihan politik memengaruhi dinamika sosial antarwarga, hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa, serta bagaimana kondisi tersebut berdampak pada pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk memperoleh data secara menyeluruh dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik memicu renggangnya hubungan sosial, munculnya prasangka antarkelompok, serta terjadinya diskriminasi yang dialami sebagian warga. Ketegangan sosial ini terlihat dari sikap saling menjaga jarak, menurunnya interaksi sosial, hingga berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Selain itu, dampak politik juga terlihat pada pergantian aparat desa yang diduga berkaitan dengan janji politik kepada tim sukses pasangan calon tertentu. Pergantian ini menyebabkan ketidakstabilan birokrasi dan menghambat pelayanan publik, termasuk keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pelaksanaan program pembangunan desa lainnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pilihan politik dalam Pilkada memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial, hubungan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan sosial, peningkatan komunikasi, serta kebijakan yang inklusif dan netral untuk mengembalikan keharmonisan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata kunci: Pilkada, Desa Mooat, Perbedaan Pilihan Politik, Hubungan Sosial, Pemerintahan Desa.

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi perlu untuk dapat menjaga kualitas proses demokrasi. Sebagai sebuah paham dalam pemerintahan, demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat yang tentunya murni berasal dari seluruh lapisan masyarakat (Amanda et al., 2019). Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dimana merupakan konsepsi yang sudah di idealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Dalam menjalankan kekuasaan sebagai bangsa yang merdeka harus didasarkan sesuai dengan UUD, sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara (Amirullah, 2022).

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan Negara (Anggara, 2015)

Konflik politik tidak dapat berupa konflik antara 2 individu, meskipun dalam proses konflik tersebut terjadi penguatan sumber konflik terhadap personal tetapi permasalahan yang menjadi pemicu konflik adalah keberadaan kedua pihak yang berkonflik sebagai sebuah bagian dari kelompok. Kenapa demikian? Rauf menegaskan bahwa konflik politik bukanlah konflik yang berkembang dari permasalahan yang sifatnya isu personal atau individu melainkan keberadaan isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga walaupun dalam konflik politik terjadi pertentangan antara dua orang hal tersebut merupakan pembelaan orang tersebut terhadap kebijakan ataupun pilihan kelompoknya terhadap isu publik selaku anggota dari kelompok tersebut (Rifky S.A. & Jalius, 2023).

Pilkada sebagai ajang politik pada dasarnya merupakan sebuah panggung yang menampilkan sebuah bentuk dramaturgi. Permasalahannya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik dalam sistem demokrasi tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai penonton pasif. Pilkada idealnya harus berlangsung secara adil, dan keadilan tersebut tidak hanya berarti tidak adanya keberpihakan dari penyelenggara, tetapi juga harus mencakup keadilan dalam memperlakukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya (Akbar, 2017).

Pada hakikatnya pilkada merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang dapat membawa kemajuan bagi masyarakat dan daerahnya. Diharapkan, melalui Pilkada, lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi mayoritas harapan rakyat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kedaulatan rakyat dengan penuh martabat (Akbar, 2017).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk memastikan peningkatan partisipasi pemilih di berbagai daerah. Upaya ini menjadi salah satu agenda utama pada Pilkada serentak tahun 2024, di mana setiap tahapan pelaksanaan dirancang untuk berjalan transparan, inklusif, dan demokratis. Pilkada tahun 2024 di Bolaang Mongondow Timur yaitu pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur yang terdiri dari 2 Paslon, Yakni Paslon Nomor Urut 1 Atas Nama Oskar Manoppo – Argo V. Sumaiku Atau di Sebut Juga Pasangan OPPO ARGO, dan juga Paslon Nomor Urut 2 Atas Nama Sam Sachrul Mamonto – Rusmin Mokoagow yang di Sebut Juga Pasangan ARUS.

Adapun penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur pada pilkada serentak 2024 yang diikuti **7** Kecamatan, dan **81** Desa di Bolaang Mongondow Timur, KPU BOLTIM Tetapkan **62.321** DPT Pemilih Serentak Tahun 2024. Terdiri dari Pemilih Laki-laki **32.279** dan Pemilih Perempuan **30.042**, yang nantinya akan berpartisipasi secara serentak. Yang salah satunya di Desa Mooat ikut berperan serta pada pilkada serentak 2024 dengan Total Pemilih Berjumlah **4.809**. Data ini memberikan gambaran awal mengenai distribusi pemilihan ditingkat Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan di lapangan bawasannya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Desa Mooat, perbedaan pilihan politik selalu menjadi salah satu penyebab munculnya ketegangan dalam hubungan masyarakat. Konflik yang timbul akibat perbedaan ini umumnya bersifat verbal atau lisan. Konflik lisan ini mencakup berbagai bentuk, seperti debat, polemik, perbedaan pendapat, hingga adu argumen yang intens. Faktanya ini terlihat ketika kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik saling mempertahankan argumen masing-masing, terkadang dengan nada yang emosional. Saling menyerang melalui kata-kata, baik secara langsung maupun dalam percakapan tidak langsung, menjadi ciri khas konflik ini. Meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik, konflik lisan ini tetap berpotensi merusak keharmonisan hubungan bermasyarakat.

Dampak jangka pendek maupun jangka panjang pada sistem pemerintahan di desa meliputi beberapa hal, di antaranya ketidakaktifan aparat desa yang berbeda pilihan dengan kepala desa atau aparat lainnya, pengunduran diri aparat desa akibat perbedaan pilihan, munculnya dugaan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait diskriminasi dalam penyaluran bantuan di desa karena beda pilihan, serta penurunan partisipasi masyarakat yang berbeda pilihan menarik diri dalam berpartisipasi pada Kegiatan-kegiatan di desa. Efek dari dampak tersebut menyebabkan perencanaan pembangunan di desa mengalami keterlambatan atau tidak selesai tepat waktu.

Fenomena yang terjadi di Desa Mooat, Kecamatan Moaat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menarik untuk dikaji melalui pendekatan sosiologis. Pilkada tidak hanya menjadi arena persaingan antar kandidat, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat desa berinteraksi dengan politik lokal. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat memperlebar jarak antar masyarakat dengan pemerintah desa, terutama jika pihak yang terpilih dianggap lebih mendukung kelompok tertentu. Penelitian ini dapat melihat faktor-faktor yang memengaruhi polarisasi politik, dampaknya terhadap struktur sosial desa, dan pendekatan yang digunakan untuk mengembalikan keharmonisan setelah pilkada dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah penelitian akademis, tetapi juga memberikan saran praktis untuk pemerintah desa dan masyarakat untuk mengatasi masalah serupa di masa depan.

Penelitian terdahulu oleh (Sugitanata & Muannif Ridwan, 2022) menyoroti perbedaan pilihan politik dalam lingkup keluarga, dengan fokus pada manajemen konflik rumah tangga akibat perbedaan pandangan politik. Demikian pula, Penelitian (Keluarga et al., 2025) membahas bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam keluarga akibat perbedaan pilihan politik, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis serta

menganalisis dampak dari konflik tersebut terhadap keharmonisan keluarga, termasuk bagaimana konflik tersebut memengaruhi komunikasi, kedekatan emosional, dan stabilitas relasi antar anggota keluarga. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa konflik politik dapat menembus ranah personal, namun ruang lingkungannya terbatas pada relasi interpersonal di tingkat keluarga.

Berbeda dengan itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada konteks dan ruang lingkup kajian. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika sosial di Desa Mooat, Kecamatan Mooat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan meneliti bagaimana perbedaan pilihan politik dalam Pilkada 2024 memengaruhi hubungan masyarakat dengan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi sosial yang berdampak langsung pada renggangnya hubungan antarwarga, diskriminasi, ketidakstabilan pemerintahan desa, serta hambatan dalam pelayanan publik dan pembangunan. Pendekatan teoritis yang digunakan juga berbeda, yakni menggunakan perspektif sosiologi politik dan teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons untuk menganalisis stabilitas sosial dan fungsi integratif pemerintah desa dalam meredakan ketegangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi sosial dan politik yang ditimbulkan oleh polarisasi politik di tingkat desa serta mengidentifikasi strategi pemulihan yang dapat ditempuh agar pembangunan desa tetap berjalan inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi politik, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah desa dalam mengelola konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong, 2017), yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan terhadap kondisi alami serta perilaku manusia dalam konteksnya. Pendekatan ini meliputi tahapan penyusunan proposal, proses pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji dampak konflik terhadap hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa, serta memahami faktor-faktor yang memperburuk maupun meredakan konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik pasca-Pilkada.

Penentuan informan menggunakan teknik nonprobability sampling, yakni snowball sampling, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019). Informan awal ditetapkan dari kalangan aparat desa, yang selanjutnya memberikan rekomendasi informan berikutnya hingga informasi yang diperoleh dianggap memadai dan relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat membantu peneliti memahami kasus yang sedang diteliti serta menyajikan temuan tersebut kepada orang lain (Nurdewi, 2022).

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Awal Mula Adanya Perbedaan Pilihan Politik Dalam Pilkada Di Desa Mooat

Pelaksanaan pilkad tahun 2024 Di Desa Mooat membawa perubahan sosial dan politik yang cukup signifikan, perbedaan pilihan mulai muncul secara nyata sejak tahap kampanye Pilkada 2024 berlangsung. Warga mulai menyatakan dukungan mereka terhadap dua pasangan calon yang bertarung, yakni pasangan OPPO-ARGO dan ARUS, masyarakat Desa Mooat pun terbelah dalam preferensi politik yang berbeda-beda seperti hubungan emosional, keyakinan terhadap visi-misi calon, hingga ajakan dari keluarga, kerabat, atau tokoh masyarakat.

Keberagaman pilihan ini kemudian berkembang menjadi pembentukan kelompok pendukung yang cukup solid dan terlihat dalam aktivitas sosial sehari-hari. Saat masa kampanye Pilkada mulai memanans, hubungan antarwarga di Desa Mooat mulai mengalami pergeseran. Warga yang sebelumnya saling bergaul akrab mulai menjaga jarak satu sama lain karena perbedaan pilihan politik. Tidak jarang ada yang sengaja menghindari interaksi dengan mereka yang diketahui mendukung calon yang berbeda, sehingga suasana jadi canggung saat bertemu dalam kegiatan sosial. Situasi ini menandai awal dari ketegangan sosial yang meluas dan masih tersisa meskipun proses Pilkada telah usai.

Pernyataan di atas berdasarkan wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Mooat Bapak Resi Mamonto (47) yakni sebagai berikut :

"Saya melihat, perbedaan pilihan ini mulai terasa sejak masa kampanye dimulai. Waktu itu masyarakat sudah mulai terbuka menyatakan dukungan, ada yang ke pasangan OPPO-ARGO, ada juga yang ke ARUS. Nah, dari situ sudah mulai kelihatan kelompok-kelompok kecil terbentuk. Orang-orang yang biasanya berkumpul bersama, sekarang jadi mulai jaga jarak. Saya kira ini karena mereka merasa tidak enak kalau beda pandangan politik. Apalagi ada juga pengaruh dari tokoh masyarakat dan keluarga yang ikut menyarankan atau bahkan mengarahkan pilihannya masing-masing. Tapi ya namanya politik, wajar kalau ada yang berbeda. Cuma sayangnya, beda pilihan itu kadang dibawa terlalu serius sampai mengganggu hubungan sehari-hari."

(wawancara pak Resi, 14 Mei 2025. Pukul 14.05-15.00 Wita, Desa Mooat)

Berdasarkan wawancara dengan informan masyarakat Bapak Resi Mamonto (47), terlihat bahwa awal mula munculnya perbedaan pilihan politik di Desa Mooat mulai terasa sejak masa kampanye Pilkada dimulai. Saat itu, masyarakat mulai terbuka menyampaikan dukungan mereka terhadap pasangan calon tertentu, yaitu pasangan OPPO-ARGO dan ARUS. Sejak saat itu, terbentuk kelompok-kelompok kecil di tengah masyarakat berdasarkan pilihan politik masing-masing. Warga yang sebelumnya sering berinteraksi dan berkumpul bersama, mulai menjaga jarak karena merasa tidak nyaman jika berbeda pandangan politik dengan orang terdekatnya.

Selain itu, pilihan politik masyarakat juga dipengaruhi oleh tokoh masyarakat maupun keluarga, yang secara tidak langsung memberikan arahan atau saran dalam menentukan pilihan. Meskipun informan menyadari bahwa perbedaan pilihan dalam politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, ia juga mengungkapkan keprihatinan bahwa perbedaan ini justru dibawa terlalu serius, hingga berdampak pada terganggunya hubungan sosial antarwarga. Hal ini menggambarkan bahwa proses politik, terutama Pilkada, bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga sangat memengaruhi dinamika sosial yang ada di tengah masyarakat.

Kemudian untuk memahami awal mula perbedaan pilihan politik di Desa Mooat, pandangan aparat desa menjadi penting karena mereka langsung menyaksikan perubahan dinamika sosial sejak masa kampanye hingga setelah Pilkada berlangsung. sebagaimana diuraikan dalam pernyataan aparat desa ibu Resita Lomotu (31) sebagai berikut:

"saya melihat Perbedaan pilihan ini tidak hanya berdampak antarwarga, tapi juga menyentuh hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa. yang di mana mulai dari pergantian pejabat kepala desa hingga aparat desa. Ini diduga sebagai bagian dari janji politik kepada tim sukses paslon tertentu, yang memang dijanjikan posisi jika paslon yang mereka dukung menang. adapun dampak yang terjadi pada agenda penting desa, seperti penyaluran BLT, pencairan dana desa, hingga musyawarah desa yang jadi agak terlambat dari jadwal yang seharusnya. Dari sini saya melihat bahwa perbedaan pilihan politik mulai muncul sejak masa kampanye berlangsung, dan terus berkembang hingga memengaruhi stabilitas pemerintahan desa."

(wawancara ibu Resita, 13 Mei 2025. Pukul 13.00- 13.48 Wita, Desa Mooat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa ibu Resita Lomotu (31), terlihat bahwa perbedaan pilihan politik dalam Pilkada 2024 di Desa Mooat tidak hanya berdampak pada hubungan antarwarga, tapi juga memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa. Informan menjelaskan bahwa setelah Pilkada selesai, muncul pergantian pejabat dan aparat desa, yang diduga merupakan bagian dari janji politik kepada tim sukses pasangan calon tertentu. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pengaruh politik dalam struktur pemerintahan, yang sebenarnya bisa mengganggu profesionalitas dan netralitas pemerintah desa. Selain itu, akibat dari kondisi ini, beberapa agenda penting desa seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pencairan dana desa, dan musyawarah desa juga mengalami keterlambatan.

Berdasarkan wawancara dengan warga dan aparat desa, perbedaan pilihan politik di Desa Mooat mulai terlihat sejak masa kampanye Pilkada 2024. Dukungan terhadap pasangan OPPO-ARGO dan ARUS memicu terbentuknya kelompok-kelompok sosial kecil yang membuat hubungan antarwarga menjadi renggang. Dampaknya tidak hanya terasa dalam kehidupan sosial, tetapi juga memengaruhi jalannya pemerintahan desa. Pergantian aparat desa yang diduga sebagai bagian dari janji politik menimbulkan keterlambatan dalam agenda

penting desa, seperti penyaluran BLT dan musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial dan administratif di desa.

Jika dilihat dari perspektif teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam sistem sosial masyarakat desa. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara fungsi-fungsi sosial agar masyarakat tetap stabil. Dalam konteks Desa Mooat, konflik akibat perbedaan pilihan politik menunjukkan terganggunya fungsi integrasi sosial, yang seharusnya dijalankan oleh lembaga seperti keluarga, pemerintah desa, maupun tokoh masyarakat. Ketika fungsi integrasi ini terganggu, maka struktur sosial menjadi tidak seimbang dan cenderung menciptakan disintegrasi. Dalam konsep partisipasi politik yang dijelaskan dalam kajian teori, keterlibatan masyarakat dalam politik seharusnya mendorong pembentukan tatanan sosial yang demokratis dan partisipatif, bukan sebaliknya. Namun dalam kasus ini, praktik politik yang tidak dikelola secara bijaksana justru menimbulkan ketegangan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan memperlemah partisipasi mereka dalam kegiatan desa. Maka dari itu, pemahaman terhadap dinamika politik lokal sangat penting untuk merancang pendekatan yang lebih inklusif dan harmonis demi menjaga stabilitas sosial serta kelancaran jalannya pemerintahan di tingkat desa.

Selain itu, hasil penelitian (Rifky S.A. & Jalius, 2023) dan (Kembangan et al., 2025) turut memberikan gambaran yang relevan mengenai bagaimana perbedaan pilihan dalam Pilkada dapat menciptakan fragmentasi sosial yang memecah hubungan antarwarga. Penelitian mereka mengungkap bahwa pembentukan kelompok berdasarkan dukungan politik sering kali melahirkan prasangka antarkelompok hingga berdampak pada kehidupan sosial sehari-hari. Fenomena yang terjadi di Desa Mooat, seperti munculnya kelompok-kelompok kecil berdasarkan pasangan calon yang didukung serta renggangnya interaksi sosial warga, menunjukkan pola yang serupa. Bahkan, pengaruh politik lokal tersebut semakin diperkuat oleh tokoh masyarakat dan jejaring keluarga, sehingga memperluas dampak perpecahan sosial. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memberikan landasan konseptual dan empiris yang kuat bahwa dinamika politik lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap kohesi sosial dan stabilitas pemerintahan desa.

Situasi semacam ini tentu membuat suasana di desa jadi tidak nyaman, dan membuat pelayanan serta kegiatan desa terganggu. Maka dari itu, bagian selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang bagaimana perbedaan pilihan politik ini berdampak terhadap hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa.

3.2 Dampak Perbedaan Pilihan Pilkada Terhadap Hubungan Masyarakat Dan Pemerintah Desa

Perbedaan pilihan dalam Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi yang idealnya dihargai sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun di tingkat desa, perbedaan tersebut sering kali menimbulkan dampak sosial yang cukup serius. Dalam kasus di Desa Mooat, Pilkada 2024 tidak hanya berisi persaingan antar calon kepala daerah, tetapi juga menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. Terjadi pengelompokan berdasarkan afiliasi politik, yang dalam beberapa kasus menimbulkan adu argumen dan gesekan antarwarga. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian menjaga jarak satu sama lain karena perbedaan dukungan politik, bahkan enggan terlibat dalam kegiatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pilkada hanya berlangsung sementara, dampak sosialnya bisa bertahan lebih lama dan memengaruhi kehidupan sosial warga sehari-hari.

Di samping terganggunya hubungan antarwarga, dampak Pilkada juga terlihat dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa. Beberapa warga merasa tidak nyaman berinteraksi dengan aparat desa yang dianggap berasal dari kubu lawan, bahkan terdapat aparat desa yang memilih mundur karena tekanan sosial atau konflik internal di keluarga. Perbedaan pilihan politik tidak hanya berdampak secara personal, tapi juga memengaruhi kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Misalnya, partisipasi warga dalam program pembangunan menjadi menurun, kegiatan sosial berjalan kurang maksimal, dan komunikasi antara aparat dengan masyarakat menjadi terhambat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses politik di desa tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial dan pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk membangun kembali ruang dialog, mengedepankan kepentingan bersama, dan memulihkan hubungan sosial pasca Pilkada agar stabilitas dan pembangunan desa bisa kembali berjalan optimal.

3.2.1 Terjadinya Perubahan Struktur Aparat Desa

Di Desa Mooat, perbedaan pilihan politik yang mengemuka pada Pilkada tahun 2024 menjadi sorotan penting karena berdampak langsung terhadap dinamika politik pilkada pada Masyarakat dan pemerintahan desa.

Salah satu aparat desa Mooat yang telah bertugas sejak tahun 2019 menjelaskan bahwa selama dua kali pelaksanaan Pilkada yakni tahun 2021 dan 2024 perbedaan pilihan politik selalu memengaruhi hubungan sosial masyarakat dan jalannya pemerintahan desa. Dalam wawancaranya, ia menyampaikan:

“Saya bertugas di Desa Mooat sejak tahun 2019, dimana saya sudah 2 kali mengalami masa pilkada, yaitu pilkada pada tahun 2021 dan tahun kemarin 2024. Yang saya lihat, setiap Pilkada tentunya terjadi perbedaan pilihan di masyarakat desa Mooat. Perbedaan pilihan ini sangat mempengaruhi hubungan, baik sesama masyarakat maupun pemerintah desa. Pada pilkada tahun 2021, ketika selesai pemilihan berlangsung, terjadi perdebatan di struktur pemerintahan desa, mulai dari pergantian Pejabat Kepala Desa sampai pada pergantian aparat desa.”

(wawancara ibu Resita, 13 mei 2025. Pukul 13.00- 13.48 Wita, Desa Mooat)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparat desa mooat, pernyataan informan yang telah bertugas di Desa Mooat sejak tahun 2019 memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika politik lokal yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada, khususnya tahun 2021 dan 2024. Dari penuturan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa perbedaan pilihan politik tidak hanya menjadi fenomena biasa dalam proses demokrasi, tetapi telah berdampak langsung terhadap struktur sosial dan pemerintahan di desa. Ketegangan ini berpotensi menghambat interaksi sosial, kerja sama antarwarga, dan bahkan partisipasi dalam kegiatan desa.

Kemudian Fenomena perbedaan pilihan politik dalam Pilkada tidak hanya menimbulkan perpecahan sosial di tengah masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung pada stabilitas birokrasi pemerintahan desa. Hal ini kemudian di ungkapkan kembali oleh informan pertama, yang menjelaskan bahwa pasca pelaksanaan Pilkada, ketegangan tidak hanya terjadi di kalangan warga, tetapi juga merembet ke dalam struktur pemerintahan desa. Ia menyebutkan bahwa:

“Ketika selesai pemilihan berlangsung, terjadi polemik di struktur pemerintahan desa, mulai dari pergantian Pejabat Kepala Desa sampai pada pergantian aparat desa sebagai janji politik (jabatan) kepada para tim sukses dari salah satu paslon jika terpilih nanti, dan ini pun masih terjadi sampai pada Pilkada tahun 2024 kemarin.”

(wawancara ibu Resita, 13 mei 2025. Pukul 13.00- 13.48 Wita, Desa Mooat)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa setelah Pilkada berlangsung di Desa Mooat, muncul masalah-masalah politik yang langsung berdampak pada pemerintahan desa. Informan menjelaskan bahwa setiap kali Pilkada selesai, selalu ada gejolak di dalam struktur pemerintahan, seperti adanya pergantian pejabat dan aparat desa. Pergantian ini bukan semata karena kebutuhan kerja, tetapi lebih karena janji politik yang sudah dibuat oleh calon kepala daerah kepada tim suksesnya. Pergantian tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan politik tertentu, di mana posisi dalam pemerintahan diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah membantu memenangkan calon tertentu. Kondisi ini memperlihatkan adanya praktik politik balas jasa di tingkat desa, yang membuat batas antara urusan pemerintahan dan kepentingan politik jadi kabur.

Akibatnya, pemerintahan desa menjadi tidak stabil. Aparat yang baru diangkat belum tentu punya pengalaman atau kemampuan yang cukup, karena mereka dipilih bukan berdasarkan kinerja, tapi karena kedekatan politik. Hal ini berdampak pada terlambatnya pelayanan publik dan pelaksanaan program-program desa. Fenomena seperti ini juga menunjukkan kalau pemerintahan desa sangat rentan mengalami konflik internal, apalagi saat ada pergantian kekuasaan yang tidak dikelola dengan baik. Hubungan antara aparat lama dan baru sering tidak berjalan harmonis, bahkan menimbulkan ketegangan pribadi.

Dari hasil wawancara dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pilihan politik dalam Pilkada berdampak pada hubungan sosial masyarakat dan jalannya pemerintahan desa. Pergantian aparat karena janji politik menunjukkan adanya kepentingan kekuasaan yang mengganggu sistem yang seharusnya berjalan netral. Jika dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi integrasi dan pencapaian tujuan dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pemerintah desa belum mampu menjaga keseimbangan sosial karena masih ada kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih diutamakan daripada kepentingan bersama.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Enal (36) selaku aparat desa yang lama, informan juga menjelaskan tantangan yang dihadapi setelah pilkada 2024 selesai, khususnya terkait penyesuaian dalam struktur perangkat desa yang baru. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“Tantangan pertama yang aparat lama hadapi adalah penyesuaian dari perangkat desa. Perangkat yang baru dilantik sebagai hasil dari Pilkada masih banyak yang belum memahami tugas dan sistem pemerintahan. Jadi, mau tidak mau, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Ini menjadi dampak yang cukup besar bagi desa. Salah satunya terlihat pada proses pencairan dana desa yang ikut terhambat karena adanya pergantian perangkat, terutama dengan adanya kekosongan pada operator desa menyebabkan pembangunan di desa menjadi terhambat dan terlambat. Hal ini sangat berpengaruh. Sementara itu, jika tidak terjadi pergantian perangkat, maka proses administrasi dan program desa tetap bisa berjalan lancar tanpa hambatan.”

(wawancara pak Enal, 14 mei 2025. Pukul 16.28-17.00 Wita, Desa Mooat)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan utama pasca Pilkada di Desa Mooat adalah penyesuaian perangkat desa baru yang belum sepenuhnya memahami sistem pemerintahan. Hal ini berdampak pada kelambatan proses administrasi dan terganggunya pencairan dana desa, terutama karena adanya kekosongan jabatan seperti operator desa, dimana operator desa sangat penting dalam proses perencanaan desa sampai pada pelaksanaan pembangunan desa. Dengan mundurnya operator desa mooat tersebut, maka pembangunan di desa menjadi terhambat dan terlambat, menyebabkan desa mooat tidak dapat mengelola anggaran dana desa pada tahun 2024, Kondisi ini juga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program pembangunan.

Situasi ini dapat dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, di mana setiap bagian dari sistem sosial memiliki fungsi yang saling mendukung untuk menjaga keseimbangan (equilibrium). Dalam konteks ini, perangkat desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan berfungsi untuk menjalankan roda administrasi dan pelayanan. Ketika fungsi ini terganggu akibat pergantian yang tidak siap, maka sistem secara keseluruhan ikut terdampak. Akibatnya, pelayanan publik dan pembangunan desa menjadi korban dari dinamika politik tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan dari studi yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh (Taufik, A., & Hamrun, 2018), menunjukkan bahwa konflik politik pada tingkat lokal, khususnya dalam pemilihan kepala desa, sering memunculkan ketegangan yang berdampak pada hubungan sosial maupun stabilitas pemerintahan. Studi tersebut mengungkap bahwa setelah pemilihan berlangsung, muncul dinamika berupa perdebatan internal, ketidakstabilan struktur pemerintahan, hingga pergantian aparat desa yang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan organisasi, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Temuan ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di Desa Mooat, di mana pergantian perangkat desa pasca Pilkada 2021 dan 2024 bukan hanya berdampak pada disharmoni sosial, tetapi juga menghambat fungsi administrasi desa, sehingga menyebabkan tersendatnya pelayanan publik serta penundaan pelaksanaan program pembangunan.

Untuk melihat dampak Pilkada secara lebih menyeluruh, peneliti juga menggali pandangan langsung dari masyarakat Desa Mooat. Wawancara dilakukan dengan beberapa warga yang mengalami secara langsung dinamika sosial selama dan setelah pelaksanaan Pilkada 2024. Dari hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa perbedaan pilihan politik tidak hanya menimbulkan ketegangan saat masa kampanye, tetapi juga berlanjut setelah Pilkada selesai.

3.2.2 Adanya Diskriminasi Pada Masyarakat

Adanya perbedaan pilihan dalam Pilkada 2024 di Desa Mooat telah menimbulkan dampak yang lebih dalam daripada sekadar perbedaan pandangan politik. Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya diskriminasi sosial yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merembes hingga ke lingkungan keluarga dan tempat kegiatan sosial, seperti Posyandu. Masyarakat yang dianggap tidak sejalan secara politik kerap diperlakukan berbeda, baik dalam interaksi sosial sehari-hari maupun dalam partisipasi mereka di kegiatan desa. Ketegangan politik ini berubah menjadi tekanan sosial yang membuat beberapa warga, termasuk kader Posyandu, memilih mengundurkan diri karena merasa tidak lagi diterima di tengah komunitasnya.

Perbedaan pilihan Pilkada yang terjadi pada masyarakat, termasuk mereka yang merupakan kader Posyandu di Desa Mooat, tidak hanya menciptakan ketegangan dalam ruang publik, tetapi juga menyusup hingga ke lingkungan

pribadi. Ketegangan ini tidak hanya terlihat dalam bentuk perdebatan terbuka antarwarga, tetapi juga dalam sikap saling menjauh dan keengganan untuk terlibat dalam kegiatan sosial desa. Bahkan, di beberapa kasus, perbedaan pilihan politik memicu konflik dalam lingkup keluarga, yang akhirnya berdampak pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan seperti Posyandu. Seperti yang di katakan oleh ibu Nurhayanti Hapili dalam wawancara sebagai berikut:

“Saat masa Pilkada masih berlangsung, sempat terjadi perdebatan antarwarga karena masing-masing ingin mempertahankan pilihannya, Sampai ini juga saya melihat kondisi desa belum sepenuhnya aman. Masih ada kelompok masyarakat, terutama dari tim salah satu pasangan calon, yang belum bisa menerima hasil Pilkada. Mereka masih menyimpan rasa kecewa, dan itu cukup terasa dalam interaksi sosial sehari-hari.”

(wawancara ibu Nuriyanti, 15 mei 2025. Pukul 14.39-15.00 Wita, Desa Mooat)

Dari hasil wawancara di atas, informan menyampaikan bahwa selama masa Pilkada berlangsung, suasana sosial di desa sempat memanas karena adanya perbedaan pilihan. Warga saling mempertahankan pilihannya masing-masing dan tidak jarang terjadi perdebatan antarpending. Meski Pilkada telah selesai, informan menilai bahwa suasana desa belum sepenuhnya pulih. Masih ada sebagian masyarakat terutama dari tim salah satu pasangan calon yang belum bisa menerima hasil pemilihan. Misalnya, ada warga yang masih enggan menyapa atau berbaur dengan pihak yang dianggap berbeda pilihan. Meskipun secara terbuka tidak ada konflik besar, tapi suasana canggung dan renggang masih terasa di tengah masyarakat. perbedaan pilihan politik saat Pilkada tidak hanya berdampak pada hubungan antarwarga, tapi juga memengaruhi keharmonisan dalam keluarga dan pemerintahan desa. Kondisi ini juga menjadi salah satu alasan mengapa informan memilih untuk mengundurkan diri sebagai kader posyandu diman memang sebelumnya ia berbeda pilihan dengan suaminya, ditambah tekanan sosial dari lingkungan yang mempertanyakan sikapnya. Kondisi ini menggambarkan bagaimana politik praktis bisa masuk ke ruang pribadi dan pekerjaan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut :

“Saya pribadi memutuskan mengundurkan diri saja dari kader posyandu. Awalnya karena perbedaan pilihan antara saya dan suami. Lalu saya mendengar beberapa ucapan dari pihak lain yang menyebut saya hanya ‘cari aman’ karena bergabung dengan pemerintah. Ucapan itu membuat saya merasa tidak dihargai, apalagi di rumah pun saya dan suami sering berdebat soal pilihan politik. Saya merasa perbedaan ini tidak seharusnya dibawa ke dalam pekerjaan. Karena itu saya memilih mundur dan mengikuti pilihan suami saja. Setelah saya berhenti, ternyata ada juga beberapa kader posyandu sekitar 4 orang yang ikut berhenti dan tidak aktif lagi.”

(wawancara ibu Nuriyanti, 15 mei 2025. Pukul 14.39-15.00 Wita, Desa Mooat)

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa ia memilih mengundurkan diri dari jabatan sebagai kader posyandu karena adanya konflik akibat perbedaan pilihan politik dengan suaminya. Selain itu, munculnya ucapan dari orang sekitar yang menilai dirinya hanya “cari aman” karena bergabung dengan pihak pemerintah membuatnya merasa tidak dihargai. Kondisi ini menimbulkan tekanan secara emosional, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam keluarga. Ia menilai bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak dicampuradukkan dengan urusan pekerjaan. Namun, karena situasi yang tidak nyaman tersebut terus berlanjut, ia akhirnya memilih mundur dan mengikuti pilihan politik suaminya. Setelah ia keluar, diketahui bahwa beberapa kader posyandu lainnya juga ikut mengundurkan diri, sehingga aktivitas posyandu pun ikut terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa konflik politik tidak hanya memengaruhi hubungan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan pelayanan di tingkat desa.

Jadi dapat dilihat bahwa Pilkada 2024 tidak hanya menjadi momentum politik semata, tetapi juga membawa dampak sosial yang cukup kompleks. Tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, kondisi ini juga memengaruhi pelayanan publik, seperti yang terjadi pada kader posyandu yang memilih mengundurkan diri karena tekanan sosial dan konflik internal keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik praktis telah merambah ke dalam ruang pribadi masyarakat desa, termasuk dalam lingkungan kerja dan pelayanan sosial. Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangat penting untuk menjadi perekat sosial, menciptakan ruang partisipatif, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat agar fungsi sosial dalam sistem desa dapat berjalan secara seimbang dan harmonis.

3.2.3 Terganggunya Penyaluran BLT Pada Masyarakat

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program penting yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan di desa, seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Mooat, ditemukan bahwa setelah pelaksanaan Pilkada 2024, proses distribusi BLT mengalami hambatan yang diduga berkaitan dengan faktor politik. Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan menyatakan bahwa mereka tidak lagi terdaftar sebagai penerima, sementara nama-nama baru yang muncul justru berasal dari kelompok pendukung calon yang menang dalam Pilkada. Temuan ini mengarah pada dugaan adanya perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan pilihan politik, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini mencerminkan bahwa konflik politik di tingkat lokal tidak hanya memengaruhi hubungan sosial, tetapi juga bisa membatasi akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka.

Peneliti menggali perspektif langsung dari salah satu penerima BLT. Wawancara ini dilakukan karena kelompok ini sering kali terdampak oleh perubahan kebijakan dan dinamika politik di tingkat desa. Melalui pengalaman mereka, peneliti dapat menilai apakah perbedaan pilihan politik juga memengaruhi akses terhadap bantuan sosial serta keterlibatan mereka dalam kegiatan desa pasca Pilkada. Berikut ini wawancara bersama ibu Selvi Rotinsulu (47) salah satu warga yang terkena dampak perbedaan pilihan yakni sebagai berikut:

“Saya ini salah satu penerima BLT sejak tahun 2020, dan waktu itu kami sekitar 10 orang yang dapat bantuan ini. BLT ini kan bantuannya dari dana desa, dan biasanya penerimanya itu yang memang masuk kategori seperti warga miskin, lansia, atau disabilitas. semua ditentukan lewat musyawarah desa di awal tahun. Tapi tahun ini, setelah Pilkada, nama saya dan beberapa orang lainnya sudah tidak terdaftar lagi sebagai penerima. Saya sebenarnya tidak mau langsung berburuk sangka sama pemerintah desa, tapi kalau dilihat-lihat, orang-orang yang menggantikan kami itu semuanya adalah yang pilih pihak yang menang waktu Pilkada kemarin. Jadi, menurut saya, besar kemungkinan ada hubungannya juga dengan beda pilihan waktu pemilihan kemarin.”

(wawancara ibu Selvi, 16 mei 2025. Pukul 14.31-14.58 Wita, Desa Mooat)

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa adanya perbedaan pilihan politik saat Pilkada diduga memengaruhi distribusi bantuan sosial di Desa Mooat. Informan yang sebelumnya menerima BLT sejak tahun 2020 mengaku namanya dan beberapa orang lainnya tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan setelah Pilkada 2024. Meskipun tidak ingin menuduh secara langsung, informan merasa ada kaitannya dengan pilihan politik, karena sebagian besar penerima baru diketahui merupakan pendukung dari pihak yang menang. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan yang seharusnya adil dan berdasarkan kebutuhan masyarakat justru dicurigai dipengaruhi oleh kepentingan politik. Praktik semacam ini juga berpotensi memicu perpecahan sosial dan menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah desa perlu memastikan agar bantuan sosial seperti BLT benar-benar disalurkan secara transparan dan tidak dijadikan alat politik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pasca Pilkada 2024, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mooat mengalami dugaan ketidakadilan yang berkaitan dengan perbedaan pilihan politik. Beberapa warga yang sebelumnya menerima bantuan tidak lagi terdaftar, sementara penerima baru sebagian besar berasal dari kelompok pendukung calon yang menang. Meskipun tidak ada bukti langsung, situasi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan menciptakan kesan bahwa bantuan sosial digunakan sebagai alat politik. Kondisi ini berpotensi memperlebar jarak sosial dan mengurangi kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, serta mengganggu partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara objektif, adil, dan bebas dari kepentingan politik.

Penelitian yang relevan berdasarkan hasil lapangan ini tentunya itu seperti halnya (Nurcholifah & Wulan, T. R., Wuryaningsih, 2025), meneliti politisasi program bantuan sosial PKH dalam konteks pemilu, dan menemukan bahwa alokasi bantuan sering disalahgunakan sebagai alat politik dengan mendahulukan pendukung calon tertentu. Temuan ini sejalan dengan pengalaman warga Desa Mooat: informan menyatakan bahwa setelah Pilkada, BLT yang seharusnya diberikan secara adil berdasarkan kebutuhan justru diduga dikelola secara partisan, karena penerima baru banyak berasal dari kelompok pendukung calon pemenang.

Jika dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, situasi tersebut mencerminkan terganggunya fungsi integrasi sosial dalam masyarakat. Ketika konflik pilihan politik tidak dikelola dengan baik, maka tatanan

sosial menjadi tidak stabil dan berpengaruh pada pencapaian tujuan bersama. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan peran sebagai agen integrasi yang menjembatani perbedaan dan menciptakan kembali keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Begitu pula, dalam konsep partisipasi politik, stabilitas dan kepercayaan publik merupakan modal penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Ketika masyarakat merasa tidak terlibat atau bahkan tersisih karena pilihan politik, maka partisipasi mereka akan menurun, dan hal ini berdampak langsung pada keberhasilan program-program pemerintah desa.

3.3 Upaya Pemulihan dan Penguatan Keharmonisan Pasca Pilkada

Setelah Pilkada 2024 selesai, kondisi sosial di Desa Mooat tidak langsung kembali normal. Perbedaan pilihan politik sempat memicu ketegangan antarwarga dan membuat sebagian masyarakat menjaga jarak satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah. Berbagai cara dilakukan, mulai dari mengajak warga terlibat dalam kegiatan bersama, sampai pendekatan personal untuk membangun kembali komunikasi yang sempat terputus. Sub bab ini akan membahas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat dalam memulihkan hubungan sosial serta menguatkan kembali rasa kebersamaan pasca Pilkada:

“Sebagai Kepala Desa, saya merasa bahwa dalam situasi Pilkada, seorang pemimpin harus tetap netral dan merangkul seluruh masyarakat, tanpa memandang siapa yang mereka pilih. Walaupun memang sempat terjadi perselisihan antarwarga karena perbedaan pilihan. Tapi saya berusaha hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pendekatan dan merangkul kembali semua pihak agar tidak ada yang merasa dikucilkan. Dalam berbagai kegiatan desa seperti kerja bakti, acara suka maupun duka dan juga di acara pernikahan melalui sambutan resmi pemerintah. Dalam sambutan tersebut saya menegaskan bahwa masa Pilkada telah selesai dan tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai perbedaan pilihan antara 01 maupun 02. Saya beserta aparat pemerintahan mengajak seluruh Masyarakat dari berbagai latar belakang pilihan untuk kembali bersatu dan bersama-sama membangun Desa Mooat tercinta.”

(wawancara kepala desa bpk Darwin, 19 mei 2025. Pukul 13.37-14.12, Desa Mooat)

Dari hasil wawancara, pernyataan Kepala Desa Mooat terlihat bahwa beliau memiliki pandangan yang cukup bijak dalam menyikapi situasi politik, khususnya saat Pilkada. Sebagai pemimpin, beliau menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan merangkul semua masyarakat tanpa membeda-bedakan pilihan politik. Di situ terlihat bahwa kepala desa mengambil peran penting dalam meredakan ketegangan pasca Pilkada yang sempat memicu perselisihan antarwarga karena perbedaan pilihan. Beliau tidak tinggal diam, tapi justru turun langsung di tengah masyarakat untuk melakukan pendekatan dan memastikan semua pihak merasa dirangkul. Salah satu bentuk pendekatan tersebut terlihat dalam kegiatan desa seperti kerja bakti, acara duka dan suka, hingga sambutan pada acara pernikahan dijadikan momen untuk menyampaikan pesan-pesan persatuan. Dalam sambutannya, kepala desa menegaskan bahwa masa Pilkada sudah selesai dan tidak perlu ada lagi perdebatan soal siapa yang memilih 01 atau 02. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, tanpa melihat latar belakang pilihan politik, untuk kembali bersatu membangun Desa Mooat.

Sebagai bagian dari lembaga desa yang memiliki peran strategis, Ketua BPD juga memberikan pandangannya terkait upaya pemulihan dan penguatan keharmonisan pasca Pilkada. Hasil wawancara ini menjadi pelengkap untuk melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD dalam merespons dampak sosial akibat perbedaan pilihan politik di masyarakat:

“Sebagai Ketua BPD, saya menyarankan bahwa proses menyatukan masyarakat pasca Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab BPD, sangadi, atau perangkat desa saja, tetapi semua pihak harus terlibat. Siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin harus menunjukkan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang pilihannya, adalah warga Bolaang Mongondow Timur, adalah masyarakat dari bupati terpilih.”

(wawancara ketua BPD bpk Heldi, 20 mei 2025. Pukul 16.06-17.00, Desa Mooat)

Dari pernyataan Ketua BPD, terlihat bahwa beliau punya pandangan yang cukup bijak soal pentingnya kebersamaan setelah Pilkada. Ia menekankan bahwa upaya untuk menyatukan masyarakat pasca pemilu bukan cuma tugas BPD, sangadi, atau perangkat desa saja, tapi semua pihak harus ambil bagian. Artinya, proses pemulihan hubungan sosial tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan perlu kerja sama dari seluruh elemen desa. Selain itu, ia juga menekankan bahwa siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin harus mampu menunjukkan sikap

adil dan terbuka kepada seluruh warga, tanpa membedakan latar belakang pilihan politik. Dengan kata lain, pemulihan sosial pasca Pilkada membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi simbol persatuan bagi semua masyarakat Bolaang mongondow Timur, khususnya di Desa Mooat.

Sebagai lembaga yang juga berperan dalam pembangunan desa, BPD tidak tinggal diam dalam merespons dampak sosial pasca Pilkada. Melalui wawancara bersama Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa upaya merangkul masyarakat yang berbeda pilihan di lakukan melalui kegiatan yang cukup banyak menghadirkan seluruh masyarakat, salah satunya terlihat dari kegiatan pembentukan koperasi yang bebas dari unsur politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan ketua BPD, dapat disimpulkan bahwa upaya pemulihan dan penguatan keharmonisan pasca Pilkada di Desa Mooat dilakukan secara aktif dan bertahap melalui berbagai pendekatan sosial. Kepala desa berupaya merangkul seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang pilihan politik melalui kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti dan acara resmi. Sementara itu, BPD juga mengambil langkah konkret seperti pembentukan Koperasi Merah Putih yang bebas dari kepentingan politik, sebagai ruang inklusif untuk membangun kembali semangat gotong royong. Kedua pihak menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas sosial setelah kontestasi politik.

4. Kesimpulan

Hasil Penelitian di Desa Mooat menunjukan bahwa, perbedaan pilihan politik Pilkada tahun 2024 mulai terlihat sejak masa kampanye ketika masyarakat secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan calon OPPO–ARGO dan ARUS. Perbedaan dukungan ini kemudian memicu terbentuknya kelompok-kelompok sosial berdasarkan afiliasi politik masing-masing, yang berdampak pada terganggunya hubungan sosial antarwarga. Masyarakat yang sebelumnya hidup rukun mulai menjaga jarak, saling menghindari, bahkan terlibat perdebatan akibat perbedaan pandangan politik. Faktor-faktor seperti pengaruh tokoh masyarakat, keluarga, dan hubungan emosional turut membentuk preferensi politik warga, namun kurang diimbangi dengan sikap toleransi. Dalam konteks ini, proses demokrasi yang seharusnya menjadi sarana membangun partisipasi politik justru menimbulkan ketegangan dan perpecahan sosial. Dampak perbedaan pilihan politik tersebut tidak hanya terbatas pada kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga merembet ke dalam struktur pemerintahan desa. Terjadi pergantian aparat desa yang diduga sebagai bentuk janji politik kepada tim sukses pasangan calon tertentu, sehingga menimbulkan ketidakstabilan birokrasi dan me22nghambat pelayanan publik. Kondisi ini semakin diperburuk dengan ketidaksiapan perangkat baru dan kekosongan jabatan penting, yang menyebabkan terhambatnya program pembangunan. Juga adanya keterlambatan pencarian dana desa, hingga terhambatnya pelayanan publik seperti distribusi BLT. Bahkan muncul diskriminasi sosial terhadap warga yang berbeda pilihan politik semakin memperkeruh ketegangan, bahkan merambah hingga ke lingkungan keluarga dan layanan sosial seperti Posyandu. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa pengelolaan politik yang bijaksana, proses demokrasi di tingkat desa justru berpotensi menimbulkan perpecahan sekaligus melemahkan tata kelola pemerintahan.

Referensi

1. Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *CosmoGov*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
2. Keluarga, T. H., Pakaya, R., & Kau, S. A. P. (2025). *PENGARUH KONFLIK PERBEDAAN PILIHAN POLITIK TERHADAP HARMONISASI KELUARGA*. 6(1), 57–73.
3. Kembangan, D., Village, K., Subdistrict, B., Regency, D., & Subdistrict, B. (2025). *Konflik sosial dalam dinamika pilkades desa kembangan kecamatan bonang kabupaten demak*. 8, 11–25.
4. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
5. Nurcholifah, S., & Wulan, T. R., Wuryaningsih, T. (2025). Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.988>
6. Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
7. Rifky S.A., A., & Jalius, A. A. (2023). Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 (Studi Kasus Kalimantan Barat). *Jurnal GLOBal Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 1(1), 54–72. <https://glorespublication.org/index.php/globalistik>
8. Sugitanata, A., & Muannif Ridwan. (2022). Menuju Keluarga yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik dalam Keluarga di Tengah Perbedaan Pilihan Politik. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 10–16. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>
9. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
10. Taufik, A., & Hamrun, H. (2018). Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Politikom Indonesiana*. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1408>